

## Peran *Good Corporate Governance* dalam Mencegah Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang

Lia Amelia<sup>1</sup> Erry Sunarya<sup>2</sup> Tuah Nur<sup>3</sup>

Universitas Muhammadiyah Sukabumi

<sup>1</sup>liaamelia123@ummi.ac.id <sup>2</sup>errysoen@ummi.ac.id <sup>3</sup>gem\_nur@yahoo.co.id

### ABSTRACT

*Good Corporate Governance (GCG) plays a very important role in creating a transparent, accountable and integrity corporate environment. One of the main objectives of implementing GCG is to prevent corrupt practices and abuse of authority that can harm the company and society. This article discusses how GCG principles, such as transparency, accountability, clear division of authority, and anti-corruption policies, can reduce the risk of unethical actions in organizations. In addition, the role of effective internal and external controls is also key in detecting and preventing abuse of authority. By consistently implementing GCG, companies can enhance their reputation, strengthen stakeholder trust, and maintain corporate sustainability. Through leadership with integrity and a corporate culture that prioritizes ethics, GCG is expected to create a business environment that is clean and free from corruption. This study aims to describe the role of GCG in preventing corruption and abuse of power and provide recommendations to strengthen GCG implementation in Indonesian companies.*

**Keywords:** *Good Corporate Governance; Corruption; Abuse of Authority; Transparency; Accountability; Supervision*

### ABSTRAK

*Good Corporate Governance (GCG) memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan perusahaan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Salah satu tujuan utama penerapan GCG adalah untuk mencegah terjadinya praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan perusahaan dan masyarakat. Artikel ini membahas bagaimana prinsip-prinsip GCG, seperti transparansi, akuntabilitas, pembagian wewenang yang jelas, serta kebijakan anti-korupsi, dapat mengurangi risiko tindakan tidak etis dalam organisasi. Selain itu, peran pengawasan internal dan eksternal yang efektif juga menjadi kunci dalam mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Dengan menerapkan GCG secara konsisten, perusahaan dapat meningkatkan reputasi, memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan, dan menjaga keberlanjutan perusahaan. Melalui kepemimpinan yang berintegritas dan budaya perusahaan yang mengedepankan etika, GCG diharapkan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang bersih dan bebas dari korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran GCG dalam mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat implementasi GCG di perusahaan-perusahaan di Indonesia.*

**Kata kunci:** *Good Corporate Governance; Korupsi; Penyalahgunaan Wewenang; Transparansi; Akuntabilitas; Pengawasan*

## PENDAHULUAN

Korupsi dan penyalahgunaan wewenang adalah dua masalah besar yang dapat merusak reputasi dan kelangsungan hidup sebuah perusahaan. Dalam konteks dunia usaha, kedua hal ini bukan hanya merugikan perusahaan itu sendiri, tetapi juga dapat memengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Oleh karena itu, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik menjadi salah satu solusi efektif untuk mencegah terjadinya praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. GCG merujuk pada serangkaian prinsip dan praktik yang diterapkan untuk memastikan perusahaan dikelola dengan cara yang transparan, akuntabel, dan etis. Dengan struktur pengawasan yang kuat, GCG memberikan arah bagi perusahaan untuk bertindak sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku, serta memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*). Dalam artikel ini, kita akan membahas bagaimana GCG berperan dalam mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang di perusahaan.

Krisis ekonomi telah menjadi landasan untuk melakukan refleksi kritis dan auto kritik atas kebijakan pembangunan yang selama ini dilakukan. Introspeksi dan refleksi diri merupakan suatu yang sangat berharga bagi kemajuan bangsa. Salah satu penyebab krisis adalah standar tata kelola yang rendah, baik dalam sektor ekonomi publik maupun korporat Tata kelola perusahaan atau dikenal dengan *Good Corporate Governance*, menjadi isu penting bahkan menjadi isu yang sangat menarik dari waktu ke waktu, khususnya mulai mengemuka pada tahun 1998 ketika Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan karena lemahnya praktik *Good Corporate Governance*, Penerapan *Good Corporate Governance* di Indonesia (khususnya perusahaan BUMN) dimulai dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN (Prastika, 2020). Selain itu, *Good Corporate Governance* (GCG) juga memiliki peran penting pada upaya menanggulangi terjadinya *fraud* terdapat pengelolaan perusahaan yang baik untuk mencegah terjadinya *fraud* antara lain membangun budaya kejujuran dan akhlak yang baik, kewajiban manajemen dalam menilai pencegahan *fraud*, dan pemantauan dari komite audit. GCG merupakan sebuah proses dan struktur yang berguna untuk menaikkan ketercapaian usaha dan akuntabilitas perusahaan dalam melaksanakan atau menambah nilai perusahaan berjangka waktu panjang dengan melindungi keperluan *stakeholders* sesuai dengan peraturan perundangan, moralitas, dan etika (Ulum & Suryatimur, 2022). Prinsip *good governance* yang harus diterapkan untuk mengurangi risiko kecurangan atau korupsi adalah kepastian hukum, partisipasi, transparansi, efisiensi, efektivitas, desentralisasi dan daya saing. Prinsip *good governance* itu dapat terwujud melalui keterlibatan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang memiliki kompetensi, komitmen dan konsisten serta memiliki peran *check and balance* (Delmana, 2019). *Good governance* merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang sangat ideal diterapkan di hampir seluruh negara di dunia termasuk di Indonesia. Keseimbangan antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan suatu negara akan terlihat apabila *good governance* berhasil

diselenggarakan dengan baik. Berbagai faktor yang mempengaruhi adalah masih banyaknya oknum di pemerintahan yang tidak bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Maraknya korupsi. Nepotisme yang merajalela, masih adanya diskriminasi dalam pelayanan publik, penegakan hukum yang masih tajam ke bawah tumpul ke atas, dan berbagai masalah lain menjadi cermin evaluasi bagi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. (Arti & Rizky, 2023). *Good government* merupakan sebuah kondisi yang menjamin adanya proses kesamaan, kesejajaran, kohesi, dan keseimbangan peran serta, adanya saling kontrol yang dilakukan oleh pemerintahan, rakyat, dan usahawan yang berada di sektor swasta (Hakim, 2022).

## METODE PENELITIAN

*Literature review* adalah sebuah metodologi penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan dan mengambil intisari dari penelitian sebelumnya serta menganalisis beberapa *overview* para ahli yang tertulis dalam teks. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh bukan dari pengalaman langsung, akan tetapi dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti terdahulu. Sumber data sekunder yang didapat berupa artikel atau jurnal yang relevan dengan topik di lakukan Metode penelitian *literature review* atau tinjauan pustaka adalah salah satu pendekatan dalam penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyintesis penelitian yang telah ada mengenai topik tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang perkembangan dan tren penelitian di bidang tersebut, serta untuk menemukan celah atau area yang belum banyak diteliti. Identifikasi, evaluasi, interpretasi, literatur, dan laporan digunakan dalam metode pengumpulan data. Peneliti melakukan *review*, menemukan jurnal, dan secara sistematis mengikuti langkah-langkah dari setiap prosedur yang ditunjukkan oleh prosedur (Lutfi et al., 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Penerapan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dapat Mencegah Terjadinya Praktik Korupsi dalam Perusahaan

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah praktik korupsi dalam perusahaan. Penerapan GCG yang efektif dapat menciptakan sistem pengawasan dan pengendalian yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab, yang pada akhirnya dapat meminimalkan potensi terjadinya korupsi. Berikut adalah beberapa cara penerapan prinsip-prinsip GCG untuk mencegah praktik korupsi:

1) Transparansi

Penerapan prinsip transparansi mengharuskan perusahaan untuk menyajikan informasi yang jujur dan akurat mengenai keuangan, kebijakan, serta kinerja perusahaan. Dengan transparansi, pihak-pihak terkait, termasuk pemegang saham, karyawan, dan masyarakat, dapat memantau dan mengevaluasi kegiatan perusahaan, termasuk potensi penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan lainnya.

2) Akuntabilitas

Akuntabilitas mengharuskan setiap pihak dalam perusahaan untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Dengan adanya akuntabilitas yang jelas, baik direksi, komisaris, maupun karyawan, mereka akan lebih berhati-hati dalam membuat keputusan dan bertindak untuk menghindari penyalahgunaan wewenang yang dapat berujung pada korupsi.

3) Responsibilitas

Prinsip responsibilitas memastikan bahwa perusahaan bertindak sesuai dengan tujuan dan kepentingan seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya untuk keuntungan pribadi. Prinsip ini menuntut perusahaan untuk menjalankan kebijakan dan operasionalnya dengan etika yang tinggi dan sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga mengurangi peluang terjadinya tindak korupsi.

4) Independensi

Independensi menjamin bahwa pengambilan keputusan dalam perusahaan dilakukan secara objektif dan bebas dari pengaruh pihak-pihak yang memiliki kepentingan pribadi atau kelompok. Keputusan yang independen ini mengurangi potensi terjadinya konflik kepentingan yang dapat mendorong tindakan koruptif.

5) Kewajaran (*Fairness*)

Prinsip kewajaran mengharuskan perlakuan yang adil terhadap semua pemangku kepentingan, baik itu pemegang saham, karyawan, maupun pelanggan. Dalam konteks pencegahan korupsi, prinsip ini berfungsi untuk menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan pihak tertentu atau memberi keuntungan pribadi yang tidak sah.

6) Pengawasan Internal yang Kuat

Salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah korupsi adalah dengan adanya sistem pengawasan internal yang kuat. Pengawasan internal yang melibatkan audit berkala, pemantauan pelaksanaan kebijakan, serta

kontrol yang ketat dapat mendeteksi dan mencegah potensi korupsi di dalam organisasi.

#### 7) Kode Etik dan Pelatihan

Penyusunan kode etik yang jelas dan pelatihan kepada seluruh karyawan tentang anti-korupsi adalah langkah penting dalam menciptakan budaya perusahaan yang bebas dari korupsi. Dengan kode etik yang diikuti oleh seluruh pihak di perusahaan, mereka akan lebih memahami batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar dalam menjalankan tugas mereka.

Jadi Penerapan prinsip-prinsip **Good Corporate Governance** (transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran, pengawasan internal yang ketat, dan kode etik) sangat berperan dalam menciptakan perusahaan yang bebas dari praktik korupsi. Dengan mekanisme kontrol yang kuat dan transparansi yang jelas, perusahaan dapat mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan serta publik.

## 2. Sistem pengawasan internal dan eksternal yang diterapkan dalam **Good Corporate Governance** dapat membantu mendeteksi dan mencegah tindak pidana korupsi

*Good corporate governance* nampaknya juga berpengaruh dalam mencegah terjadinya *fraud*. Praktik dalam yang tidak sehat dalam tata kelola perusahaan memungkinkan terjadi *fraud* yang sulit terdeteksi oleh pihak pemangku kepentingan. *Corporate governance* merupakan alat untuk menjamin direksi dan manajer (*insider*) agar bertindak yang terbaik untuk kepentingan investor luar (kreditur atau *shareholder*). Penerapan sistem pengawasan internal dan eksternal yang efektif dalam kerangka **Good Corporate Governance** sangat penting untuk mendeteksi dan mencegah tindak pidana korupsi. Pengawasan internal melalui audit, kontrol internal yang ketat, dan *whistleblowing system* dapat mengidentifikasi penyimpangan lebih awal, sementara pengawasan eksternal melalui audit independen, regulasi oleh otoritas, dan pengawasan dewan komisaris memberi lapisan perlindungan yang lebih luas dan objektif. Kombinasi kedua sistem ini membantu menciptakan lingkungan perusahaan yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi (Larasati & Surtikanti, 2019).

Sistem pengawasan internal dan eksternal yang diterapkan dalam **Good Corporate Governance (GCG)** memiliki peran yang sangat penting dalam mendeteksi dan mencegah tindak pidana korupsi dalam perusahaan. Kedua sistem ini saling melengkapi untuk memastikan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan berada dalam kerangka hukum dan etika yang benar. Berikut adalah penjelasan mengenai bagaimana kedua sistem pengawasan ini dapat membantu mencegah korupsi:

## 1) Pengawasan Internal

Pengawasan internal mengacu pada sistem kontrol yang diterapkan di dalam perusahaan untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur dijalankan dengan benar dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Beberapa cara pengawasan internal mencegah korupsi antara lain:

### a. Audit Internal

- Audit internal bertugas untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap aktivitas dan laporan keuangan perusahaan. Audit ini berfungsi untuk mendeteksi adanya penyimpangan atau ketidaksesuaian yang bisa jadi merupakan indikasi tindakan korupsi.
- Audit internal yang rutin dan independen dapat membantu menemukan transaksi yang mencurigakan atau tidak sesuai dengan kebijakan perusahaan, serta memberi rekomendasi perbaikan agar penyimpangan tidak terjadi lagi.
- **Contoh penerapan:** Pemeriksaan yang menyeluruh terhadap pengeluaran perusahaan, pembelian barang, atau kontrak yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan semuanya sesuai prosedur.

### b. Sistem Pengendalian Internal (*Internal Control System*)

- Sistem pengendalian internal memastikan bahwa prosedur operasional perusahaan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sistem ini berfungsi untuk membatasi peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang, termasuk tindakan korupsi.
- Pengendalian ini meliputi pemisahan tugas yang jelas, misalnya dalam proses persetujuan pengeluaran dana atau pemberian kontrak.
- **Contoh penerapan:** Pemisahan antara fungsi yang mempersiapkan anggaran, yang mengesahkan, dan yang melakukan transaksi, untuk menghindari adanya manipulasi atau penggelapan dana.

### c. *Whistleblowing System*

- Sistem pelaporan pelanggaran atau *whistleblowing* memberikan kesempatan bagi karyawan atau pihak ketiga untuk melaporkan tindakan yang mencurigakan tanpa takut adanya pembalasan. Sistem ini sangat efektif untuk mendeteksi tindak pidana korupsi yang mungkin tidak terlihat oleh pengawasan langsung.
- **Contoh penerapan:** Pembuatan saluran pelaporan yang aman dan anonim, seperti *hotline* atau platform *online*, untuk melaporkan praktik korupsi.

**d. Pelatihan dan Pembinaan Etika**

- Melakukan pelatihan berkala tentang kode etik dan kepatuhan terhadap regulasi bagi seluruh karyawan membantu mencegah perilaku yang bisa menyebabkan terjadinya korupsi. Pemahaman yang baik tentang aturan dan etika perusahaan membuat karyawan lebih mudah mendeteksi dan melaporkan tindak pidana korupsi.
- **Contoh penerapan:** Pelatihan tentang anti-penyuapan dan anti-korupsi yang mencakup pentingnya integritas dalam bekerja.

2) Pengawasan Eksternal

Pengawasan eksternal dilakukan oleh pihak luar yang independen dari perusahaan, yang berfungsi untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku. Beberapa cara pengawasan eksternal mencegah korupsi antara lain:

**a. Audit Eksternal**

- Audit eksternal dilakukan oleh firma akuntansi independen yang memeriksa laporan keuangan perusahaan dan memastikan bahwa laporan tersebut mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Audit ini dapat mendeteksi adanya praktik manipulasi data keuangan atau penggelapan dana yang dilakukan oleh manajemen.
- **Contoh penerapan:** Pemeriksaan terhadap laporan keuangan tahunan oleh auditor eksternal yang berfokus pada pengujian kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku dan mendeteksi transaksi yang tidak wajar.

**b. Regulasi dan Pengawasan oleh Otoritas Keuangan**

- Otoritas keuangan dan lembaga regulasi, seperti OJK (Otoritas Jasa Keuangan) di Indonesia, memiliki kewenangan untuk mengawasi ketaatan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, termasuk yang terkait dengan anti-korupsi. Jika ditemukan adanya penyimpangan, otoritas ini dapat memberikan sanksi atau melaporkan kasus tersebut ke pihak berwajib.
- **Contoh penerapan:** OJK atau lembaga pengawas lainnya yang melakukan pemeriksaan dan audit terhadap perusahaan yang terdaftar, untuk memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan yang melarang praktek korupsi.

**c. Pengawasan oleh Dewan Komisaris**

- Dewan komisaris bertindak sebagai pengawas eksternal yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham

dan prinsip-prinsip GCG. Dewan komisaris sering kali terlibat dalam pengawasan pengelolaan keuangan, strategi perusahaan, dan pemilihan manajemen yang tepat.

- **Contoh penerapan:** Dewan komisaris yang independen mengevaluasi kinerja manajemen, mengaudit kebijakan perusahaan, serta memastikan bahwa tidak ada tindakan yang berpotensi merugikan perusahaan atau melanggar hukum.

#### d. Laporan kepada Publik dan Pemegang Saham

- Laporan yang transparan kepada publik dan pemegang saham tentang kinerja dan keadaan keuangan perusahaan dapat memberikan tekanan untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi dengan integritas dan bebas dari korupsi. Pengawasan publik dan media juga memiliki peran dalam mendeteksi dan mengungkap praktik-praktik korupsi yang dilakukan oleh perusahaan.
- **Contoh penerapan:** Penyusunan laporan tahunan yang mengungkapkan semua transaksi material dan keputusan strategis perusahaan yang dapat diperiksa oleh pihak eksternal.

### 3) Sinergi antara Pengawasan Internal dan Eksternal

- Sinergi yang baik antara pengawasan internal dan eksternal sangat penting dalam menciptakan sistem kontrol yang kuat. Pengawasan internal memberikan lapisan pertama dari perlindungan terhadap korupsi, sementara pengawasan eksternal menambah tingkat kewaspadaan dengan memberikan objektivitas dan independensi dalam pemeriksaan dan evaluasi.
- **Contoh penerapan:** Integrasi antara audit internal yang mendalam dengan audit eksternal yang bersifat independen dan regulasi yang ketat dari otoritas eksternal, menciptakan pengawasan yang saling memperkuat dan meminimalkan risiko terjadinya korupsi.

### 3. Tantangan Yang Dihadapi Oleh Perusahaan Dalam Menerapkan *Good Corporate Governance* Sebagai Upaya Untuk Mencegah Penyalahgunaan Wewenang

Menerapkan *Good Corporate Governance* untuk mencegah penyalahgunaan wewenang memang menghadapi tantangan yang cukup kompleks, mulai dari budaya perusahaan yang tidak mendukung hingga masalah regulasi dan sumber daya. Namun, dengan komitmen yang kuat dari pimpinan perusahaan, pelatihan yang tepat, sistem pengawasan yang efektif, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, perusahaan dapat mengatasi tantangan ini dan mewujudkan lingkungan yang bebas dari korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) di perusahaan memang memiliki banyak manfaat, terutama dalam

mencegah penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi. Namun, proses implementasi GCG tidaklah mudah dan perusahaan sering kali menghadapi berbagai tantangan. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh perusahaan dalam menerapkan GCG:

1) Kurangnya Komitmen dari Pimpinan

- **Tantangan:** Komitmen yang kurang dari pimpinan perusahaan, seperti direksi atau komisaris, dapat menjadi hambatan utama dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG. Tanpa dukungan penuh dari *top management*, inisiatif GCG sering kali tidak dapat dijalankan secara maksimal.
- **Solusi:** Pimpinan perusahaan harus menunjukkan teladan dalam penerapan GCG, baik dalam pengambilan keputusan yang transparan, akuntabel, maupun dalam mempertahankan integritas. Kepemimpinan yang berkomitmen menjadi kunci untuk mendorong budaya GCG di seluruh organisasi.

2) Budaya Perusahaan yang Tidak Mendukung

- **Tantangan:** Dalam beberapa perusahaan, budaya perusahaan mungkin tidak mendukung penerapan prinsip-prinsip GCG. Misalnya, budaya yang toleran terhadap penyalahgunaan wewenang atau kolusi dapat menghambat upaya perbaikan.
- **Solusi:** Perusahaan perlu melakukan perubahan budaya yang dimulai dari tingkat manajemen hingga seluruh karyawan. Ini bisa dilakukan melalui pelatihan tentang etika, transparansi, dan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip GCG.

3) Kurangnya Sumber Daya untuk Implementasi

- **Tantangan:** Menerapkan GCG secara efektif membutuhkan sumber daya yang cukup, baik dari segi waktu, anggaran, maupun tenaga kerja. Beberapa perusahaan mungkin menghadapi kesulitan dalam menyediakan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan pengawasan yang efektif dan audit internal yang independen.
- **Solusi:** Perusahaan dapat berinvestasi dalam pelatihan, perangkat teknologi untuk mendukung transparansi, dan rekrutmen tenaga ahli untuk audit internal dan pengawasan. Mengoptimalkan teknologi informasi untuk sistem pengendalian internal dan audit bisa membantu mengurangi beban biaya.

4) Ketidakpastian dalam Regulasi dan Peraturan

- **Tantangan:** Regulasi yang tidak jelas atau sering berubah dapat membuat perusahaan kesulitan dalam menerapkan prinsip GCG.

Ketidakpastian hukum ini dapat menciptakan kebingungan dalam mengidentifikasi apa yang dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan apa yang tidak.

- **Solusi:** Perusahaan perlu bekerja sama dengan konsultan hukum atau memperbarui tim kepatuhan internal untuk selalu memantau perkembangan regulasi dan memastikan bahwa kebijakan perusahaan selalu sesuai dengan hukum yang berlaku.

5) Perlawanan terhadap Pengawasan dan Kontrol

- **Tantangan:** Beberapa pihak di dalam perusahaan mungkin merasa terancam atau tidak nyaman dengan sistem pengawasan yang ketat, terutama jika mereka merasa pengawasan tersebut mengurangi kebebasan atau kontrol mereka terhadap keputusan perusahaan. Hal ini bisa mengarah pada perlawanan terhadap implementasi GCG.
- **Solusi:** Komunikasi yang jelas mengenai manfaat GCG untuk perusahaan dan para pemangku kepentingan sangat penting. Selain itu, memastikan bahwa pengawasan yang diterapkan adalah objektif dan adil dapat membantu mengurangi resistensi terhadap kontrol yang lebih ketat.

6) Masalah dalam Pengelolaan Konflik Kepentingan

- **Tantangan:** Pengelolaan konflik kepentingan menjadi salah satu tantangan besar dalam penerapan GCG. Misalnya, ketika anggota dewan direksi atau komisaris memiliki hubungan bisnis pribadi dengan pihak ketiga yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan, hal ini bisa menyebabkan penyalahgunaan wewenang.
- **Solusi:** Perusahaan harus memiliki kebijakan yang jelas tentang pengelolaan konflik kepentingan dan memastikan bahwa seluruh pengambil keputusan tidak terlibat dalam situasi yang dapat menimbulkan konflik. Pencatatan yang transparan terkait konflik kepentingan dan deklarasi kepemilikan saham atau hubungan bisnis juga penting.

**4. Efektivitas penerapan *Good Corporate Governance* dalam menciptakan budaya integritas dan mengurangi risiko korupsi dalam organisasi perusahaan**

**Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)** dalam perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan dalam menciptakan budaya integritas dan mengurangi risiko korupsi. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip GCG secara konsisten, perusahaan dapat membangun sistem yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab, yang pada gilirannya akan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dan tindakan korupsi. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang efektif dapat menciptakan budaya integritas yang kuat dan mengurangi risiko korupsi dalam perusahaan dengan cara:

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan.
2. Memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal untuk mendeteksi penyimpangan lebih awal.
3. Memberikan saluran pelaporan yang aman bagi *whistleblower*.
4. Menyediakan pelatihan yang mendalam tentang etika dan anti-korupsi.
5. Menerapkan kebijakan dan prosedur yang jelas serta penegakan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang mengutamakan kejujuran dan mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang atau tindakan korupsi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

*Good Corporate Governance* (GCG) memainkan peran yang sangat penting dalam mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang di dalam perusahaan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar GCG seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran, perusahaan dapat membangun sistem yang dapat mengawasi dan mengendalikan praktik-praktik yang tidak etis atau merugikan. Melalui transparansi, perusahaan dapat memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan yang diambil tercatat dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan, sehingga meminimalisir peluang untuk tindakan korupsi atau penyalahgunaan jabatan. Akuntabilitas memastikan bahwa setiap individu dalam perusahaan bertanggung jawab atas tindakan mereka, baik itu keputusan manajerial maupun operasional, yang berpotensi mengurangi penyalahgunaan kekuasaan. Sistem pengawasan internal dan eksternal yang efektif, termasuk audit dan mekanisme pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*), membantu mendeteksi lebih awal potensi korupsi dan tindakan yang merugikan perusahaan. Pelatihan dan pengembangan mengenai etika bisnis dan anti-korupsi mendukung pembentukan budaya integritas di seluruh organisasi, yang mendorong karyawan untuk selalu bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang kuat. Secara keseluruhan, penerapan GCG yang konsisten dan efektif dapat menciptakan lingkungan yang bebas dari praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang, serta meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap perusahaan. Dengan demikian, GCG berfungsi tidak hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan bisnis yang sehat dan berkelanjutan, tetapi juga sebagai benteng untuk menjaga integritas dan etika dalam seluruh aspek operasional perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, R. (2016). 済無No Title No Title No Title. 10(July), 1–23.
- Ainul Arofah. (2024). Implementasi Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt Bprs Tulen Amanah. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5(1),

1–22. <https://doi.org/10.30739/jesdar.v5i1.2782>

Arti, N. D. B., & Rizky, R. Y. (2023). Analisis Korupsi Dan Upaya Mewujudkan Good Governance Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 15(2), 135–149. <https://doi.org/10.33701/jiapd.v15i2.3798>

Delmana, L. P. (2019). Pengaruh Penerapan Good Governance Dalam E-Purchasing Terhadap Pencegahan Korupsi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 45(1), 47–62. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v45i1.241>

Hakim, H. (2022). Sinergi Antara Good Government Dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (Aaupb) Dalam Upaya Pencegahan Korupsi. *DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 7(2), 191–200. <https://doi.org/10.36636/dialektika.v7i2.1461>

Ismantara, S., Ajeng, R., Puspa, D., & Elvira, C. (2021). *Pidana Korupsi*. 9(20), 1179–1188.

Larasati, Y. S., & Surtikanti, S. (2019). Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Pencegahan Fraud di Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa (Riset Empiris pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KEMENTERIAN KELAUTAN dan PERIKANAN). *Journal of Accounting, Finance, Taxation, and Auditing (JAFTA)*, 1(1), 31–43. <https://doi.org/10.28932/jafta.v1i1.1526>

Lutfi, M., Surejo, S., & Septiana, P. (2022). Systematic Literature Review : Penerapan Algoritma Naives Bayes Dalam Sistem Pakar. *Jurnal Minfo Polgan*, 11(2), 7–13. <https://doi.org/10.33395/jmp.v11i2.11635>

Prastika, R. Y. (2020). Efektivitas Penerapan Good Corporate Governance (Gcg) Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Pt Kereta Api Indonesia (Persero). *Jurnal Idea Hukum*, 6(1), 96–112. <https://doi.org/10.20884/1.jih.2020.6.1.134>

RezaAdrianto. (2010). *Pengaruh Penerapan Prinsip Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Di RSUD Jombang*. 5, 1267–1277. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/114570/>

Syofyan, R., & Ibrahim, A. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Perputaran Persediaan, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas Perusahaan Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Sub Sektor Ritel Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Ecogen*, 5(2), 271. <https://doi.org/10.24036/jmpe.v5i2.13153>

Ulum, S. N., & Suryatimur, K. P. (2022). Analisis Peran Sistem Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance dalam Upaya Pencegahan Fraud. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(2), 331–340.

